



INFOBENCANA

B N P B

Vol. 6, No. 12, Desember 2025

Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual

Dampak Banjir Bandang
di Salareh Aia, Palembayan,
Kab. Agam, Prov. Sumatera
Barat (30/11)



PUSAT DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN



DAFTAR ISI

INFO BENCANA

Vol. 6 No. 12 Desember 2025

2

**REVIEW BENCANA BULAN
DESEMBER 2025**

8

**PENANGANAN BANJIR DAN
TANAH LONGSOR SUMATERA
UTARA**

13

**PENANGANAN BANJIR DAN
TANAH LONGSOR SUMATERA
BARAT**

16

**BANJIR HULU SUNGAI
UTARA - AIR BERTAMU
WARGA BERSIAP**

18

**BANJIR KABUPATEN BANJAR,
PROV. KALIMANTAN
SELATAN**

21

**POTENSI RISIKO BENCANA
INDONESIA JANUARI 2026**

25

**INFOGRAFIS KEJADIAN
BENCANA DESEMBER 2025**

TIM REDAKSI:

Pimpinan Redaksi	: Abdul Muhamari
Redaktur Pelaksana	: Teguh Harjito
Redaktur	: Andri Cipto Utomo Fery Irawan
Editor	: Ainun Rosyida Ni Made Kesuma Astuti M. Ibrahim Ulinnuha
	Ardian Rizqi Ananda
	Pratama Sispa Sagardi
	Kartika Puji Pangesti
	Febrianto Kakanur Ichsan
	Miftah Aziz Maulani
	Nofid Yulianto
	Yudhi Firmansyah
	Izzar Arrisyad Faatih
	Dhita Indah Permadani
	Fida Afdhalia
	Claudio Sigit Rahardian R.
	Yufita Dewi Puspita Sari
	Survinky
Editor/Layout Editor	: Teguh Setiawan Ratih Ayu Permata
	Anita Rizki Permatasari
	Budi Assaudi
Editor Bahasa	: Rizal Yahya Lutfian P

ALAMAT REDAKSI

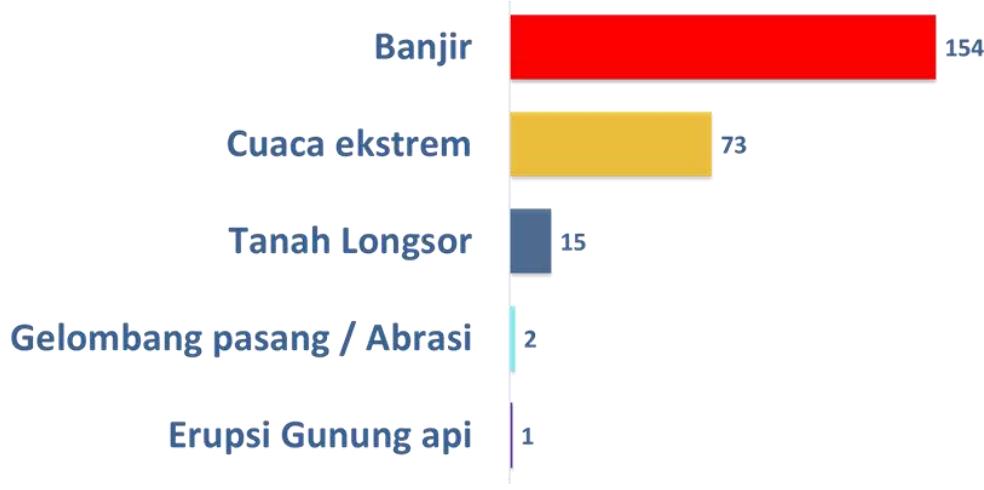
Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNBP
Graha BNBP-Lantai 12
Jl Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Whatsapp : 0851 5771 7474
Telegram : Data Bencana Indonesia
Web : gis.bnbp.go.id

REVIEW BENCANA BULAN DESEMBER 2025

Selama bulan Desember 2025 tercatat telah terjadi 245 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Kejadian bencana yang terjadi merupakan kejadian bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Sebesar 99,59% bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi dan sisanya sebesar 0,41% merupakan bencana geologi. Pada bulan Desember ini, bencana hidrometeorologi basah mendominasi dengan banjir menjadi bencana yang paling menonjol terjadi pada bulan ini. Tercatat 154 kejadian bencana banjir atau sebesar 62,86% dari total bencana terjadi di wilayah Indonesia pada bulan ini. Kejadian bencana hidrometeorologi basah lainnya, yaitu cuaca ekstrem terjadi sebanyak 73 kali, tanah longsor terjadi 15 kali, dan gelombang pasang & abrasi terjadi sebanyak dua kali pada bulan ini.

STATISTIK BENCANA INDONESIA DESEMBER 2025

Jumlah Kejadian (kejadian)	245
Korban Meninggal (jiwa)	13
Korban Luka-luka (jiwa)	8
Korban Terdampak dan Mengungsi (jiwa)	394.801
Kerusakan Permukiman (unit)	1.865



Gambar 1 Grafik Jumlah Kejadian per Jenis Bencana Bulan Desember 2025

Sumber: Pusdalops BNPB, diolah kembali oleh Tim Buletin Info Bencana

Adapun bencana geologi yang terjadi pada bulan ini adalah bencana erupsi Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi jawa Timur.

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada bulan Desember 2025 tercatat 13 orang meninggal, enam orang hilang, delapan orang luka-luka dan

Tabel 1 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Dampaknya Bulan Desember 2025*

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka/Sakit	Mengungsi & Terdampak	Rumah				Kerusakan				Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kantor	Jembatan
							Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Satuan Pendidikan	Rumah Ibadat					
1 GEOLOGI DAN VULKANOLOGI																	
	GEMPA BUMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ERUPSI GUNUNG API	1	-	-	-	742	-	-	-	138	-	-	-	-	-		
	TSUNAMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 HIDROMETEROLOGI I																	
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	KEKERINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 HIDROMETEROLOGI II																	
	BANJIR	154	9	3	1	384.386	55	76	157	77.318	-	2	-	-	28		
	GELOMBANG PASANG & ABRASI	2	-	-	-	-	-	-	6	32	-	-	-	-	-		
	TANAH LONGSOR	15	1	3	1	3.348	12	15	13	47	-	-	-	-	-		
	CUACA EKSTREM	73	3	-	6	6.325	102	193	1.236	70	5	-	-	1	-		
	TOTAL	245	13	6	8	394.801	169	284	1.412	77.605	5	2	-	1	28		

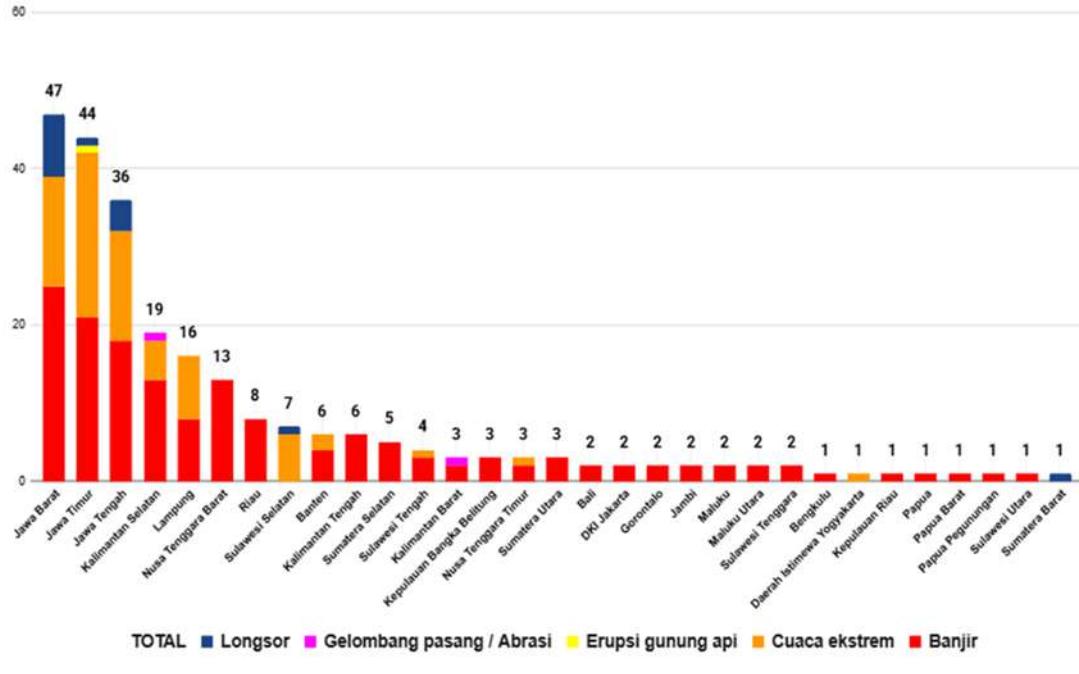
Sumber: Pusdalops BNPB, diolah kembali oleh Tim Buletin Info Bencana

*) Data per tanggal 5 Januari 2025

394.801 orang terdampak serta mengungsi. Pada bulan Desember ini, kejadian banjir merupakan kejadian yang paling banyak menyebabkan korban meninggal. Sebanyak sembilan orang meninggal akibat banjir, tiga orang di antaranya meninggal pada kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Desember 2025.

Bencana yang terjadi juga mengakibatkan kerusakan pada permukiman warga dan fasilitas umum seperti satuan pendidikan, rumah ibadat, fasilitas pelayanan kesehatan, serta fasilitas umum lainnya. Sebanyak 1.865 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana dengan klasifikasi rusak ringan hingga berat dengan rincian 1.412 unit rumah rusak ringan, 284 unit rumah rusak sedang dan 169 unit rumah rusak berat. Kerusakan rumah paling banyak disebabkan oleh bencana cuaca ekstrem dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakan mencapai 1.531 unit. Selain itu, banjir yang terjadi di bulan Desember mengakibatkan sedikitnya 77.318 unit rumah terendam. Adapun fasilitas umum yang rusak akibat bencana di antaranya lima unit satuan pendidikan, dua unit rumah ibadat, satu unit kantor, dan 28 unit jembatan.

Tren Kejadian Bencana Bulan Desember 2025 per Provinsi



Gambar 2 Grafik Jumlah Kejadian Bencana per Provinsi Bulan Desember 2025

Pada bulan Desember tahun 2025, lima provinsi dengan jumlah kejadian bencana alam terbanyak antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Lampung. Provinsi Jawa Barat mengalami 47 kejadian bencana dengan jenis kejadian bencana banjir, cuaca ekstrem (angin kencang), dan tanah longsor. Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur mengalami kejadian bencana sebanyak 44 kejadian dengan jenis kejadian banjir, cuaca ekstrem (angin kencang), dan tanah longsor serta erupsi gunung api. Untuk Provinsi Jawa Tengah mengalami 36 kejadian bencana dengan jenis bencana banjir, cuaca ekstrem (angin kencang), dan tanah longsor. Provinsi Kalimantan Selatan mengalami 19 kejadian bencana meliputi banjir, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang/abiasi. Adapun Provinsi Lampung mengalami 16 kejadian bencana dengan jenis kejadian banjir dan cuaca ekstrem.

Perbandingan jumlah kejadian bencana dan dampaknya pada bulan Desember antara tahun 2024 dan 2025 secara umum menunjukkan terjadi penurunan. Frekuensi kejadian bencana mengalami penurunan sebesar 21,47% yaitu turun dari 312 kejadian bencana di tahun 2024 menjadi 245 kejadian di tahun 2025. Korban meninggal dan hilang mengalami penurunan sebesar 66,07%, pada tahun 2024 terdapat 56 orang meninggal dan hilang akibat

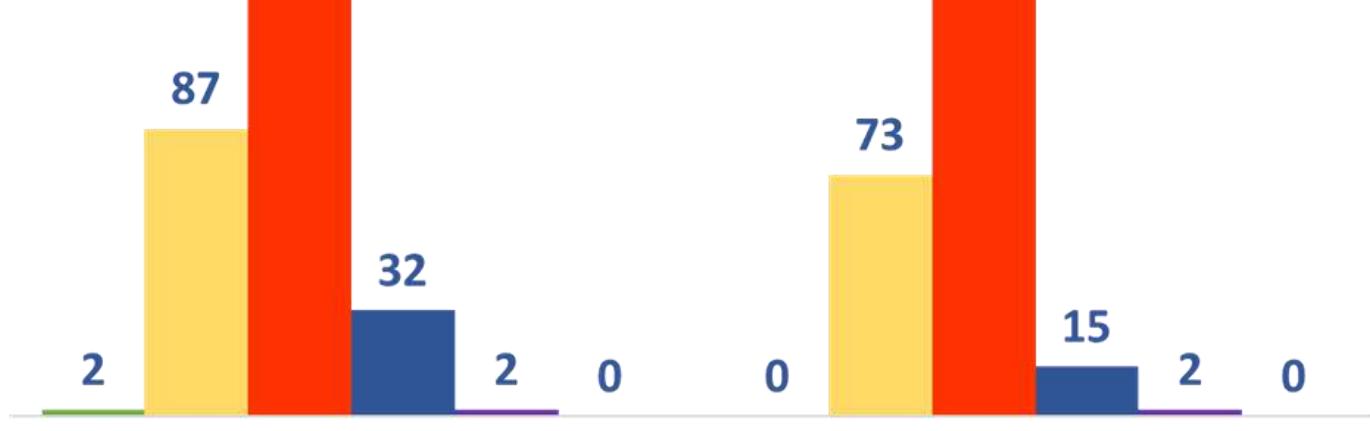
bencana sedangkan pada tahun 2025 terdapat 19 orang meninggal dan hilang. Untuk korban luka-luka mengalami penurunan sebesar 99,92%, turun dari 10.393 orang di tahun 2024 menjadi delapan orang di tahun 2025. Korban



Gambar 3 Perbandingan Jumlah Kejadian dan Dampak Bencana Bulan Desember 2024 dan 2025

terdampak dan mengungsi juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan yang terjadi sebesar 60,76%, di tahun 2024 tercatat 1.006.036 orang terdampak dan mengungsi akibat bencana sedangkan di tahun 2025 menjadi 394.801 orang. Adapun kerusakan rumah akibat bencana mengalami penurunan sebesar 74,25% dari 7.242 unit rumah di tahun 2024 menjadi 1.865 unit rumah di tahun 2025.

Perbandingan jumlah masing-masing kejadian bencana pada bulan Desember 2024 dengan Juli 2025 secara umum mengalami penurunan. Bencana banir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta tanah longsor mengalami penurunan jumlah kejadian di periode yang sama pada tahun 2024 dan 2025. Untuk bencana gelombang pasang & abrasi tidak mengalami penurunan maupun kenaikan kejadian.



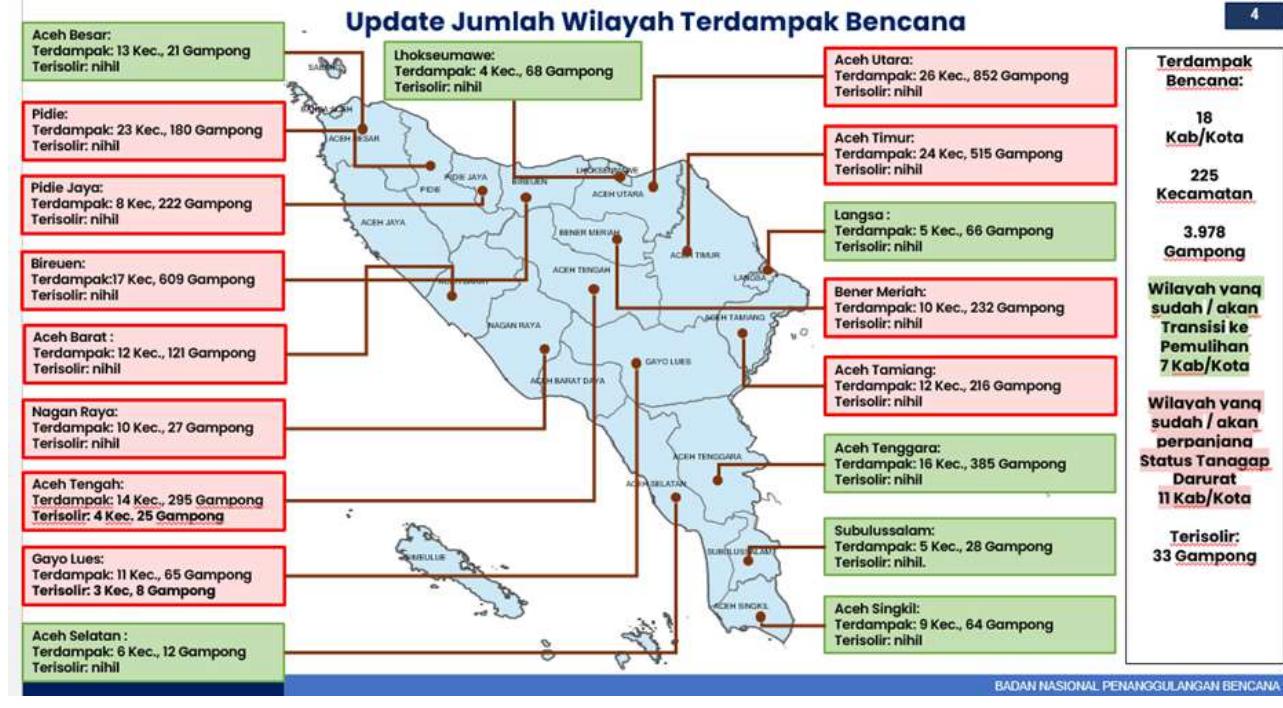
Gambar 4 Grafik Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi Bulan Desember 2024 dan 2025

PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR PROVINSI ACEH

Kronologis Kejadian

Banjir besar yang melanda Aceh pada akhir November hingga awal Desember 2025 mencakup wilayah yang cukup luas. Hujan deras memang menjadi pemicu langsung, namun kerusakan hutan, terutama di kawasan hulu yang disinyalir sebagai salah satu penyebab utama yang memperparah dampak banjir dan tanah longsor. Bencana ini tidak hanya merendam permukiman serta merusak infrastruktur, tetapi juga memutus akses kehidupan warga. Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Bireuen tercatat sebagai wilayah paling terdampak. Pada kawasan-kawasan tersebut, banjir bandang dan longsor terjadi hampir bersamaan, menghantam permukiman, persawahan, serta jalur transportasi utama. Banyak desa terisolasi akibat jembatan putus dan badan jalan yang amblas, membuat upaya penyelamatan serta distribusi bantuan berjalan dengan lebih memerlukan waktu.

Dampak



Gambar 5 Jumlah Wilayah Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Prov. Aceh. Sumber: Pusdatinkom BNPB

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu (31/12) mencatat korban meninggal mencapai 527 orang, 31 orang hilang, serta lebih dari 356.655 ribu jiwa terpaksa mengungsi. Angka ini menunjukkan betapa besar skala bencana yang terjadi. Kondisi lapangan semakin diperparah oleh rusaknya jalur transportasi utama. Akses darat menuju Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah belum dapat dilalui akibat jalan putus dan jembatan roboh. Banyak desa di wilayah dataran tinggi Gayo terisolasi total, sehingga bantuan hanya bisa menjangkau lokasi tertentu melalui jalur udara yang terbatas. Minimnya akses jalan, keterbatasan anggaran daerah, serta distribusi logistik yang tidak merata memperburuk kondisi. Hampir seluruh kecamatan di wilayah terdampak mengalami kerusakan parah, membuat warga sulit kembali menjalani kehidupan normal.

Bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh sejak akhir November 2025 mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang sangat luas dan gangguan layanan dasar. Menurut data resmi BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR), lebih dari 477 titik kerusakan infrastruktur di Aceh dilaporkan, mencakup longsor pada badan jalan, kebutuhan perbaikan puluhan jembatan yang roboh atau putus akibat tingginya debit air dan erosi tanah, sehingga memutus akses utama serta menghambat distribusi logistik dan layanan darurat di

beberapa kabupaten/kota. Kerusakan parah ini sempat membuat ratusan ruas jalan nasional tidak dapat dilintasi dan membatasi mobilitas antarwilayah.

Dampak lain yang tercatat oleh kementerian/lembaga terkait meliputi gangguan pasokan energi dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa listrik telah berhasil dipulihkan di sebagian besar desa terdampak, namun puluhan ratus desa masih mengalami pemadaman karena kerusakan jaringan akibat banjir dan longsor, merusak sekitar 970.954 pelanggan listrik di Aceh. Selain itu, BNPB melaporkan bahwa banjir dan longsor juga banyak mempengaruhi fasilitas publik lainnya seperti rumah ibadah, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, serta menyebabkan ribuan kepala keluarga mengungsi karena rumah-rumah mereka rusak atau terendam air. Upaya pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur pun terus dipacu hingga akhir Desember 2025 untuk memastikan akses layanan dasar kembali normal dan masyarakat dapat pulih dari dampak bencana ini.

Upaya Penanganan

Dalam upaya penanganan darurat bencana, pemerintah menerapkan status tanggap darurat pada kabupaten/kota terdampak sebagai dasar percepatan mobilisasi sumber daya, penanganan korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan materi tersebut, kondisi status wilayah penanganan darurat bencana di Provinsi Aceh terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu transisi darurat ke pemulihan dan perpanjangan tanggap darurat yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah masing-masing.

Pada status transisi darurat ke pemulihan, tercatat sebanyak 8 kabupaten/kota, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Aceh Singkil, Aceh Besar (dalam proses pengesahan SK), Kota Lhokseumawe, dan Aceh Barat (dalam proses pengesahan SK). Sementara itu, status perpanjangan tanggap darurat masih diberlakukan di Provinsi Aceh dan 10 kabupaten/kota, meliputi Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang, yang menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut masih memerlukan penanganan darurat secara intensif dan berkelanjutan.

Kondisi Status Wilayah Penanganan Darurat Bencana

Transisi darurat ke pemulihan	Perpanjangan tanggap darurat
Wilayah yang sudah/akan menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan sesuai Surat Keputusan Kepala Daerah	Wilayah yang sudah/akan menetapkan status perpanjangan Tanggap Darurat sesuai Surat Keputusan Kepala Daerah
8 Kab/Kota 1. Aceh Tenggara 2. Aceh Selatan 3. Kota Subulussalam 4. Kota Langsa 5. Aceh Singkil 6. Aceh Besar (Proses pengesahan SK) 7. Kota Lhokseumawe 8. Aceh Barat (Proses pengesahan SK)	Provinsi Aceh dan 10 Kab/Kota sbb: 1. Pidie 2. Pidie Jaya 3. Bireuen 4. Nagan Raya 5. Aceh Tengah 6. Gayo Lues 7. Aceh Utara 8. Aceh Timur 9. Bener Meriah 10. Aceh Tamiang

Gambar 6 Kondisi Status Wilayah Penanganan Darurat Bencana Provinsi Aceh. Sumber: Pusdatinkom BNPB

Upaya pemulihan layanan dasar pascabencana di Provinsi Aceh terus dilakukan secara terpadu, mencakup pemulihan kelistrikan, air bersih, dan pasokan BBM serta LPG. Hingga kondisi terkini, kelistrikan telah kembali normal di 13 kabupaten/kota, dengan dukungan pengiriman 202 unit genset berkapasitas 3–5 KVA, serta tambahan 1.000 genset dari Menteri ESDM yang disalurkan ke berbagai wilayah terdampak, terutama Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan kabupaten lainnya. Pada sektor air bersih, layanan belum sepenuhnya pulih, ditandai dengan 12 dari 18 kabupaten/kota masih mengalami gangguan PDAM, sehingga dilakukan berbagai intervensi seperti pembangunan dan percepatan 121 unit sumur bor (69 unit selesai), pengoperasian mobil

penjernih air, distribusi ratusan toren, truk tangki, IPA mobile, toilet darurat, dan dukungan lintas kementerian/lembaga, TNI, serta Polri, termasuk pengoperasian SPAM IKK Rantau di Aceh Tamiang.

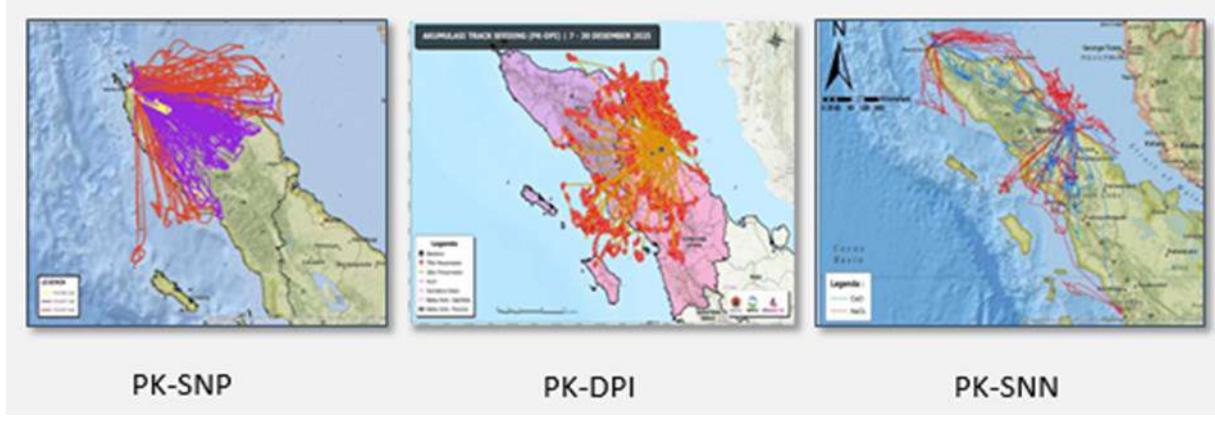


Gambar 7 Jembatan Bailey di Jalan Nasional Kutacane – Blengkejeren di Desa Lawe Penanggalan, Kab. Aceh Tenggara.

Sumber: Pusdatinkom BNPB

Sementara itu, kondisi pasokan BBM dan LPG secara umum mulai membaik, dengan distribusi darat kembali dibuka ke wilayah terpencil seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah sejak 24 Desember 2025, serta dukungan distribusi udara, termasuk pengiriman 4.000 liter solar via Bandara Rembele dan total distribusi 116.200 liter BBM ke Aceh Tenggara serta Bener Meriah hingga 31 Desember 2025, guna menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat dan operasional penanganan darurat. Pemerintah juga menggerakkan alat berat guna mendukung pemasangan jembatan bailey, dan tim tanggap darurat untuk membuka kembali jalur komunikasi penting di tengah status tanggap darurat yang diperpanjang di berbagai daerah Aceh.

Dalam mendukung penanganan bencana di Provinsi Aceh, pemerintah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan menggerakkan dukungan alutsista lintas matra secara terpadu. Dukungan udara meliputi total 13 helikopter dan sembilan pesawat yang berasal dari Lanud SIM, Lanud Kualanamu, Lanud Soewondo, dan Lanud Lhokseumawe, termasuk helikopter Caracal TNI AU, Mi-17, Bell, Sikorsky, dan pesawat Caravan serta Twin Otter yang digunakan untuk operasi logistik, evakuasi, dan OMC. Selain itu, dukungan laut melibatkan tiga kapal, termasuk kapal cepat Express Bahari 2F, sementara dukungan darat mencakup 36 unit truk TNI dan 34 unit truk BNPB untuk distribusi bantuan. Pelaksanaan OMC pada 1 Januari 2026 menggunakan tiga pesawat dengan misi penyemaian awan yang mencakup wilayah Aceh bagian utara dan tengah, guna mengendalikan intensitas curah hujan dan mendukung percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana.



Gambar 8 Wilayah operasi OMC armada tiga pesawat dengan kode registrasi PK-SNP, PK-DPI, dan PK-SNN. Sumber:

Pusdatinkom BNPB

Terkait aspek distribusi logistik dan penanganan hunian korban terdampak, penanganan darurat bencana di Aceh menunjukkan kemajuan signifikan. Tercatat hingga 30 Desember 2025, total logistik yang masuk mencapai 1.609.277 kg, dengan 1.590,07 ton atau 98,8% telah berhasil didistribusikan melalui jalur udara, darat, dan laut, didukung pesawat charter BNPB, Hercules, armada truk, serta kapal laut. Distribusi harian per 30 Desember 2025 mencatat penyaluran di Aceh sebesar 27,09 ton, Sumatera Utara 29,924 ton, dan Sumatra Barat 1,78 ton, menunjukkan kelancaran jalur distribusi lintas wilayah. Sementara itu, pada sektor hunian, tercatat 44.673 unit rumah rusak berat yang memerlukan penanganan, dengan kebutuhan 23.317 unit hunian sementara (hutara) dan 11.303 KK masuk dalam skema dukungan dana hunian (DTH). Dari 12 kabupaten/kota terdampak, baru dua kabupaten yang mengusulkan pembangunan hutara dan telah memulai pembangunan fisik, yakni Pidie serta Pidie Jaya, sementara pembangunan hutara sedang berjalan dengan dukungan 600 unit oleh Danantara dan 96 unit oleh Kementerian PUPR di Aceh Tamiang, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.

Rangkaian penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh menunjukkan upaya pemerintah yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari fase tanggap darurat hingga awal pemulihian, mencakup penetapan status kedaruratan, penggerahan alutsista serta Operasi Modifikasi Cuaca, pemulihan layanan dasar seperti listrik, air bersih, BBM dan LPG, serta percepatan distribusi logistik dan penanganan hunian bagi korban terdampak. Besarnya dampak kerusakan lintas sektor—mulai dari perumahan, infrastruktur, sosial, hingga ekonomi—menjadi dasar penting bagi penguatan sinergi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, masyarakat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan tetap mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan akuntabel, seluruh langkah ini diharapkan mampu memulihkan fungsi wilayah, mengembalikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan ketangguhan Aceh dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR PROVINSI SUMATERA UTARA

Akhir November 2025, Indonesia dilanda bencana akibat hidrometeorologi basah yakni banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat secara bertubi-tubi. Peristiwa ini menelan banyak korban dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.

Kronologi

Peristiwa yang terjadi khususnya di Provinsi Sumatera Utara diawali dengan turunnya hujan dengan intensitas tinggi, diperparah dengan perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada 17 November 2025. Hujan dengan intensitas tinggi tersebut terjadi secara terus-menerus hingga pada tanggal 24 November 2025, air menggenang membanjiri yang membuat struktur tanah melemah sehingga terjadinya banjir bandang disertai dengan longsor di sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusdalops BNPB, sebanyak 13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terdampak. Adapun rincian Kabupaten/Kota yang terdampak yaitu Langkat, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Batubara, Padang Sidempuan, Deli Serdang, Kota Medan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, dan Nias Selatan.



Gambar 9 Dampak Bencana Hidrometeorologi di Kecamatan Adiankoting, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara. Sumber: Pusdatinkom BNPB

Dampak Kejadian

Kepala Pusdatinkom BNPB Dr. Abdul Muhari, SSi., M.T., menyampaikan dalam konferensi pressnya bahwa data per tanggal 31 Desember 2025 bahwa korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi basah di Provinsi Sumatera Utara dilaporkan bahwa sebanyak 365 jiwa meninggal dunia dengan Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan kabupaten/kota yang merenggut nyawa tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 127 jiwa meninggal dunia, selanjutnya Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 88 jiwa meninggal dunia, kemudian Kota Sibolga sebanyak 55 jiwa meninggal dunia. Sebanyak 60 jiwa hilang dan 13.770 jiwa mengungsi di ribuan titik lokasi pengungsian akibat bencana banjir bandang yang menimpa Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 10 Rumah Warga Terdampak Bencana Kategori Rusak Berat di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Sumber: Pusdatinkom BNPB

unit tempat ibadah. Adapun fasilitas infrastruktur yang terdampak sebanyak empat unit jembatan nasional, enam unit jembatan provinsi, 29 unit jembatan kab/kota, 213 titik jalan nasional rusak, 117 titik jalan provinsi rusak, dan 169 titik jalan kab/kota.

Upaya Penanganan

Presiden RI Prabowo Subianto sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirimkan bantuan ke lapangan tanpa jeda dalam upaya percepatan penanganan bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa wilayah yang aksesnya terputus karena jembatan dan jalan yang rusak, pengiriman bantuan diterbangkan melalui pesawat TNI maupun pesawat sipil menuju bandara-bandara terdekat dari lokasi terdampak. Presiden RI juga menekankan bahwa seluruh bantuan yang terdiri dari peralatan darurat hingga kebutuhan vital bagi evakuasi dan pemulihan percepatan harus menjangkau titik terdalam wilayah terdampak.

Hasil visual menunjukkan arus air yang sangat kuat hingga dapat menghanyutkan pepohonan beserta mobil dan bahkan menerobos rumah warga sampai menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini mengakibatkan kerugian materiel berupa kerusakan rumah serta infrastruktur. Data estimasi rumah rusak Provinsi Sumatera Utara per tanggal 31 Desember 2025 yang telah dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 18.960 unit rumah rusak dengan rincian 9.833 unit rumah rusak ringan, 3.237 unit rumah rusak sedang, dan 5.890 unit rumah rusak berat/hilang.

Selain rumah warga, banjir dan longsor di Sumatera Utara juga memberikan dampak pada fasilitas-fasilitas umum dan infrastruktur. Fasilitas umum tersebut mencakup rusaknya 557 unit fasilitas pendidikan, 71 unit fasilitas kesehatan, 271



Gambar 11 Kondisi Jembatan Putus Akibat Banjir di Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sumber: BPBD Kabupaten Tapanuli Utara

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di Pulau Sumatra. Tiga wilayah terdampak yang menjadi atensi Pemerintah Pusat saat ini yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Kepala BNPB menginstruksikan kepada jajaran untuk memprioritaskan tiga hal antara lain operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, serta pendistribusian logistik kepada warga terdampak.



Gambar 12 Distribusi Logistik melalui jalur udara menggunakan helikopter (kiri) dan Stok Distribusi di Posko Lanud Soewondo (kanan). Sumber: BNPB

Operasi pencarian dan pertolongan area Sumatera Utara difokuskan ke wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Operasi pencarian dan pertolongan ini dipimpin oleh Basarnas dan dibantu oleh TNI, Polri, serta relawan yang diupayakan selama 24 jam.

Akses jalan dan jembatan yang terputus menyebabkan beberapa wilayah masih terisolir akibat banjir dan longsor, sehingga dalam pendistribusian logistik didorong dengan menyiagakan Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya untuk mendistribusikan bantuan logistik bantuan peralatan serta bahan makanan di tempat-tempat terpencil. Selain itu, akses jalan menuju Sibolga dari Tarutung yang tidak bisa dilalui akibat beberapa titik jalanan yang masih tertimbun. Jalan untuk percepatan pendistribusian dikoordinasikan melalui jalur laut/Pelabuhan Jago-jago dengan penggerahan kapal dari TNI Angkatan Laut. Sedangkan dukungan pendistribusian logistik melalui jalur darat dikerahkan sebanyak 31 truk BNPB.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Sumatera Utara guna mencegah banjir susulan yang ada di Sumatera terus dikerahkan. Saat ini pada tanggal 31 Desember 2025 dikerahkan dua armada pesawat dalam pelaksanaan OMC. Komposisi armada yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Utara antara lain PK YNA dan PK SCJ.

Upaya percepatan penanganan di Provinsi Sumatera Utara terus dilakukan. Fasilitas Kesehatan yang sebelumnya terdampak kini berangsur beroperasi normal. Semua rumah sakit dan puskesmas yang berlokasi di wilayah terdampak sudah kembali beroperasi penuh. Saat ini tersisa dua Pustu, satu Poskedes, dan satu Polindes yang belum beroperasi yang lokasinya terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Akses jalan yang sebelumnya terputus saat ini sudah mulai kembali normal dan sudah dapat dilalui. Saat ini untuk jalan nasional yang belum dilalui yaitu koridor Sumpang Rampa-Sibolga via Batulobang sejauh 17 km terputus. Jaringan kelistrikan di kabupaten/kota di Sumatera Utara saat ini sebagian besar sudah pulih, hanya beberapa kecamatan dan desa di Tapanuli Utara serta Tapanuli Selatan yang saat ini masih terganggu karena kendala akses

tertutup di lapangan. Upaya pemulihan akses komunikasi, BNPP juga telah mendistribusikan unit-unit starlink ke kabupaten/kota terdampak.

Tabel 2 Kondisi Jaringan Komunikasi Kab/Kota Terdampak di Provinsi Sumatera Utara. Sumber: Pusdatinkom BNPP

Kondisi Jaringan Komunikasi Kab/Kota Terdampak di Provinsi Sumatera Utara

KAB/KOTA	JARINGAN KOMUNIKASI
Tapanuli Utara	berangsur-angsur normal, sudah diberikan bantuan internet WiFi/Starlink 6 unit
Tapanuli Tengah	Dari total 99 BTS di 21 lokasi, tersisa 2 BTS yang masih down di Pogaran Honas dan Sipange
Tapanuli Selatan	±90% lancar
Kota Sibolga	Jaringan telekomunikasi lancar dan kadang agak terganggu
Langkat	Jaringan komunikasi sudah pulih dan normal
Mandailing Natal	Jaringan komunikasi sudah pulih dengan prosentase 99% dan terus dilakukan perbaikan jaringan
Humbang Hasundutan	Jaringan komunikasi sudah pulih dengan prosentase 98% dan terus dilakukan perbaikan jaringan

Secara umum kondisi ketersedian air bersih di wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan longsor relatif pulih kecuali sebagian di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Sibolga. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih oleh Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) bersama PDAM dan BPBD. Selain itu pasokan gas dan BBM mulai berangsur normal. Sebanyak 406 unit SPBU di Provinsi Sumut, 100% sudah dapat menerima pasokan BBM dan 366 SPBU atau 90% sudah beroperasi normal kembali sedangkan 40 unit SPBU atau 10% belum dapat beroperasi normal dikarenakan jalur masih terdampak. Kebutuhan LPG sudah normal, 46 unit atau 100% SPBU sudah operasional yang ada di Sumatera Utara sudah beroperasi dan 382 unit atau 100% agen sudah operasional.

Gubernur Sumatera Utara melakukan penetapan status tanggap darurat yang saat ini sudah melakukan perpanjangan kedua yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/906/KPTS/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi di Wilayah Provinsi Sumatera Utara selama 7 hari terhitung mulai tanggal 25 Desember hingga 31 Desember 2025. Berbagai pihak turun ke lokasi terdampak. BPBD dari masing-masing kabupaten/kota terdampak berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna melakukan pendataan dan penanganan.

Pembangunan Huntara dan DTH

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong dalam percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini merupakan bagian komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan terarah, terukur, serta berpihak pada keberlanjutan kehidupan warga.

Proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan terus dilakukan agar pembangunan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan serta dapat diselesaikan setelah masa tanggap darurat berakhir. Huntap ini akan

diperuntukan untuk korban yang rumahnya mengalami kerusakan berat, hilang, ataupun rumah yang berada di zona bahaya seperti di wilayah sempadan sungai.

Sementara itu, warga hingga menunggu proses pembangunan selesai diberikan bantuan pilihan. Bantuan tersebut berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) yang akan diberikan secara tunai sebesar Rp 600.000/KK yang diperuntukan untuk operasional harian. Selain itu, warga juga diberikan pilihan untuk mendapatkan bantuan berupa hunian sementara (hunaria) yang dapat dihuni hingga hunaria selesai.

Tabel 3 Kondisi Jaringan Komunikasi Kab/Kota Terdampak di Provinsi Sumatera Utara. Sumber: Pusdatinkom BNPB

Update Data Progres Pembangunan Hunaria dan DTH di Prov. Sumatera Utara (1/2)									70
No	KAB/KOTA	EST. RB*	HUNARIA	DTH	EST. MULAI	EST SELESAI	UPDATE PROGRES	KETERANGAN	
1	Tapanuli Utara	175	40	135	20/12	31/01	sudah terbangun 2 unit	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Hunaria: Desa Sibolangi - Progres: Pembuatan mal, masih tahap persiapan pembangunan - Kendala: Menunggu kedatangan beberapa bahan material bangunan 	
2	Tapanuli Tengah	2,226	595	1,484			-	<ul style="list-style-type: none"> - SK DTH Tahap I: 721 KK ditandatangani Bupati; - DTH Tahap II: 320 KK (masih proses pendataan/ber tambah) - Hunaria tersedia: Rusunawa Pandan (67 unit, terisi 47) & Asrama Haji Pinangsori (52 unit) - Verifikasi KK: Baru 74 KK terdata, verval terkendala medan/lokasi. - Rencana lokasi Hunaria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Balerong & lahan Kel. Tukka → survei 2. Aloban Tapian Nauli → survei selesai, tunggu bahan 3. Kebun Pisang, Kec. Bodiri → survei selesai, tunggu bahan 4. Muara Sibatuan → bahan siap, tinggal bangun 5. Kalangan → survei 6. Balerong Rampai Sitahuis → survei 7. Balerong Kel. Nauli Sitahuis → survei 	
3	Tapanuli Selatan	2,137	695	1,442			-	<ul style="list-style-type: none"> - Penlok Hunaria: 119 unit di Kec. Sipirok, 31 Des 2025 oleh Korem 023/Kawal Samudra - Data Rumah: 846 unit masuk KRB → total RB + KRB = DTH Hunaria; sesuai SK BNBA - DTH: Permohonan lengkap sudah diajukan - Relokasi Hunaria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Batang Toru → PTPN IV Regional I Afdeling III Perkebunan Batang Toru 2. Sipirok → BPP Dinas Pertanian Kab. Tapsel, Dusun Aek Latong Desa Marsada - Status Pembangunan: Hunaria belum dilaksanakan - Lokasi calon Hunaria/Hunaria (kelayakan geologi): <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sumuran (15 ha, kelayakan Oke, proses persetujuan PTPN) 2. Desa Hapesong (5 ha, pemotongan lahan) 3. Dusun Aek Latong (2,5 ha, pembebasan lahan, tunggu hasil geologi) 4. Desa Tandilhat (5 ha efektif 3,7 ha, pelepasan lahan & persetujuan PTPN, tunggu geologi) 5. Lobu Uhom (5 ha, pengusulan ke PTPN, tunggu rekam geologi) 	

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Update Data Progres Pembangunan Hunaria dan DTH di Prov. Sumatera Utara (2/2)									71
No	KAB/KOTA	EST. RB*	HUNARIA	DTH	EST. MULAI	EST SELESAI	UPDATE PROGRES	KETERANGAN	
4	Kota Sibolga	240	0	330				<ul style="list-style-type: none"> - DTH: Permohonan lengkap sudah diajukan - Hunaria: Tidak diajukan 	
5	Langkat	714	0	714				<ul style="list-style-type: none"> - DTH: Permohonan lengkap sudah diajukan - Kerusakan Rumah: 714 unit rusak berat (SK 900-1/K/2025); rusak ringan & sedang masih proses verifikasi BNBA - Penerima DTH: SK Bupati No. 900-82/k/2025 menetapkan 714 KK 	
6	Humbang Hasundutan	165	0	165				<ul style="list-style-type: none"> - DTH: Permohonan lengkap diajukan dengan data verval - Komposisi DTH: 42 rumah rusak berat + 123 terancam/zona merah - Hunaria: 165 unit (masih bisa berubah, akan diinformasikan lebih lanjut) 	
7	Mandailing Natal	1	0	0					
8	Batu Bara	98	0	98					
9	Tebing Tinggi	2	0	2					
10	Binjai	19	0	19					
11	Padang Sidempuan	22	0	22					
12	Deli Serdang	22	0	22					
13	Nias	6	0	6					
14	Nias Barat	2	0	2					
15	Medan	59	0	59					
16	Serdang Bedagai	0	0	0					
17	Pak Pak Bharat	2	0	2					
	TOTAL	5,890	1,178	4,502			2 unit Hunaria	sudah dibangun	

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR PROVINSI SUMATERA BARAT

Banjir bandang yang melanda Provinsi Sumatera Barat pada akhir November 2025 merupakan bencana hidrometeorologi berskala besar yang dipicu oleh curah hujan tinggi berkepanjangan serta diperparah oleh kondisi lingkungan yang semakin rapuh. Intensitas hujan ekstrem yang terjadi dalam waktu relatif singkat menyebabkan sungai-sungai utama meluap, memicu banjir luas dan longsor di berbagai wilayah. Selain faktor cuaca, degradasi lingkungan turut berkontribusi signifikan dalam memperparah dampak bencana. Berkurangnya tutupan hutan di wilayah hulu sungai, alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan permukiman yang tidak diimbangi dengan upaya mitigasi yang memadai, telah menurunkan daya serap tanah. Kondisi ini meningkatkan aliran permukaan (runoff), sehingga hujan deras dapat mengancam wilayah hilir. Akibatnya, banjir bandang membawa material lumpur, kayu, dan batu yang merusak permukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur vital.

Ribuan rumah terendam dan rusak, akses jalan terputus, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat lumpuh. Banyak warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena rumah mereka tidak lagi layak huni atau berada di zona berbahaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Januari 2026, dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat tercatat sebagai berikut 264 orang meninggal dunia, 74 orang dinyatakan hilang, dan 10.854 jiwa terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya. Besarnya jumlah korban jiwa dan pengungsi tersebut mencerminkan tingginya tingkat kerusakan serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak, sehingga memerlukan penanganan lanjutan.



Gambar 13 Pos Dukungan Logistik Nasional Provinsi Sumatera Barat. Sumber: BNPB

Sebagai bagian dari upaya penanganan banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah terus memastikan ketersediaan dan penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Melalui Pos Dukungan Logistik Nasional, bantuan dari berbagai pihak dikelola secara terpusat agar pendistribusianya tepat sasaran, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, khususnya dalam mendukung masa transisi darurat menuju pemulihan bagi masyarakat yang menempati hunian sementara. Berdasarkan pendataan Gudang Logistik Pos Dukungan Sumatera Barat per 4 Januari 2026 pukul 16.00 WIB, tercatat buffer stok logistik sebesar 66,58 ton yang terdiri atas logistik permakanan, sandang, dan peralatan. Seiring dengan berakhirnya fase tanggap darurat di sebagian wilayah, telah menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan. Pada fase ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat mulai mengalihkan fokus dari penanganan darurat ke pemulihan fungsi sosial, ekonomi, dan infrastruktur, termasuk pembersihan material banjir, perbaikan akses jalan dan jembatan, pemulihan layanan dasar, dan pendataan kerusakan serta kerugian.

Jaringan listrik & Jaringan Komunikasi

Pasca kejadian bencana yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat, mengakibatkan jaringan listrik dan telekomunikasi sempat terputus, sehingga aktivitas masyarakat dan layanan publik mengalami gangguan, pemerintah berupaya untuk melakukan penanganan darurat serta pemulihan infrastruktur dasar secara intensif bersama instansi terkait. Salah satu fokus utama dalam tahap awal pemulihan adalah perbaikan jaringan komunikasi dan pasokan listrik yang sempat terganggu akibat bencana. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan dari instansi teknis, jaringan komunikasi serta kelistrikan di wilayah terdampak saat ini telah pulih dan kembali berfungsi



Gambar 14 Peta Kondisi Jaringan Listrik dan Komunikasi Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Barat. Sumber: BNPB

Jaringan Air Bersih

Secara umum, layanan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan perbaikan. Sebagian besar wilayah telah kembali mendapatkan akses air bersih secara bertahap, namun demikian, di beberapa daerah tertentu, pemenuhan kebutuhan air bersih yang masih didukung melalui sarana air bersih.

Kondisi BBM dan LPG

Dalam rangka mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat dan operasional penanganan bencana, pemerintah bersama instansi terkait terus memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta elpiji di wilayah terdampak. Berdasarkan hasil pemantauan, ketersediaan BBM di wilayah Provinsi Sumatera Barat saat ini, berada dalam kondisi memadai. Meskipun demikian, terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala dalam distribusi akibat pengalihan jalur lalu lintas dari ruas Padang–Bukittinggi ke jalur Sitinjau Lauik. Kondisi ini menyebabkan penambahan waktu tempuh distribusi BBM hingga sekitar enam jam dari waktu normal. Sementara itu, ketersediaan elpiji di wilayah Provinsi Sumatera Barat juga dilaporkan dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, pengalihan jalur lalu lintas yang sama turut berdampak pada proses distribusi elpiji di sejumlah wilayah, sehingga membutuhkan tambahan waktu tempuh pengiriman. Untuk memastikan kelancaran pasokan, pemenuhan stok elpiji bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah Sumatera Barat bagian timur, seperti Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan wilayah sekitarnya, dipasok dari FT Siak.

secara normal. Pulihnya infrastruktur tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran aktivitas masyarakat serta mendukung efektivitas koordinasi penanganan bencana di lapangan. Dengan kembalinya jaringan komunikasi, proses penyampaian informasi, pelaporan kondisi lapangan, dan koordinasi antarinstansi dapat dilakukan secara lebih cepat serta akurat. Sementara itu, pulihnya pasokan listrik memungkinkan fasilitas umum, layanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat beroperasi kembali secara bertahap.



Gambar 15 Peta Ketersediaan Air Bersih Kabupaten/Kota Prov. Sumatera Barat . Sumber: BNPB



Gambar 16 Peta Ketersediaan BBM dan LPG Kabupaten/Kota Prov. Sumatera Barat. Sumber: BNPB

Layanan Kesehatan

Saat ini, fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di wilayah terdampak bencana telah kembali beroperasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berfungsi kembali fasilitas kesehatan tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin akses pelayanan medis, baik untuk penanganan kasus kegawatdaruratan maupun pelayanan kesehatan dasar bagi pengungsi. Penyakit terbanyak yang diderita oleh pengungsi adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan jumlah kasus mencapai 9.548 kasus, disusul oleh penyakit hipertensi sebanyak 4.171 kasus. Tingginya kasus ISPA dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pascabencana, seperti kualitas udara yang menurun, kepadatan di lokasi pengungsian, serta perubahan cuaca. Sementara itu, kasus hipertensi banyak ditemukan pada kelompok rentan, terutama lansia, yang mengalami tekanan fisik dan psikologis selama masa pengungsian. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan, BPBD, serta tenaga medis terus melakukan pemantauan kondisi kesehatan pengungsi, penyediaan obat-obatan, serta pelayanan kesehatan keliling di lokasi pengungsian.

Rumah Rusak

Aliran banjir bandang yang membawa lumpur, kayu, dan material batu menghantam kawasan permukiman, terutama yang berada di bantaran sungai dan lereng perbukitan, sehingga banyak rumah mengalami rusak ringan hingga berat dan tidak lagi layak huni. Kondisi tersebut memaksa ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus bertahan di lokasi pengungsian dengan keterbatasan ruang serta fasilitas.

Untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengupayakan berbagai skema penanganan hunian pascabencana yang dilaksanakan secara bertahap.

Pemerintah telah merencanakan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 872 unit serta penyaluran Dukungan Tempat Hunian (DTH) sebanyak 2.227 unit yang tersebar di beberapa kabupaten/kota terdampak. Hingga awal Januari 2026, progres pembangunan Huntara telah berjalan di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan total 292 unit Huntara yang saat ini berada dalam tahap pembangunan. Sementara itu, pada beberapa kabupaten/kota lainnya tidak diajukan pembangunan Huntara. Sebagai alternatif penanganan, pemerintah memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada keluarga terdampak. DTH diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara guna membantu penyintas memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal, seperti menyewa rumah atau menumpang secara layak, selama masa transisi menuju pemulihan. Skema ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi masyarakat sambil menunggu pembangunan hunian tetap terealisasi.



Gambar 17 Peta Kondisi RS dan Faskes Kabupaten/Kota Prov. Sumatera Barat. Sumber: BNPB



Gambar 18 Peta Sebaran Rumah Rusak Kabupaten/Kota Prov. Sumatera Barat. Sumber: BNPB

BANJIR HULU SUNGAI UTARA - AIR BERTAMU WARGA BERSIAP



Gambar 19 Kondisi Banjir di Kab. Hulu Sungai Utara. Sumber: Laporan BPBD Kab. Hulu Sungai Utara

Curah hujan yang tinggi selama beberapa hari berturut-turut di Kalimantan Selatan menyebabkan kenaikan muka air sungai secara signifikan. Kondisi tersebut mengakibatkan air meluap ke halaman hingga permukiman warga, dan menjelang akhir pekan banjir mulai merendam rumah-rumah masyarakat.

Banjir melanda Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Banjar pada Sabtu–Minggu, 20–21 Desember 2025. Curah hujan yang tinggi membuat sungai dan saluran drainase kewalahan menampung debit air. Akibatnya, genangan meluas dan aktivitas warga pun ikut terkendala.

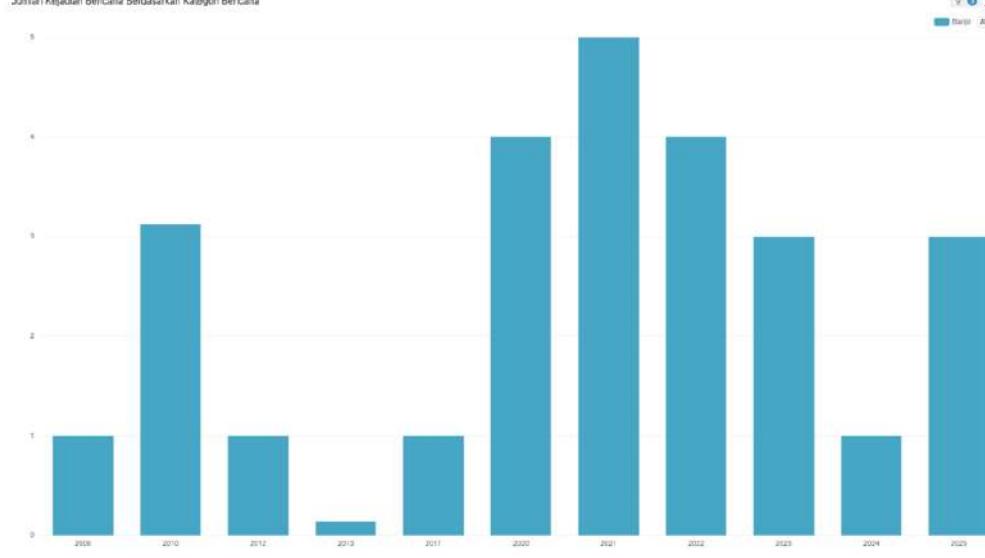
Pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedikitnya 563 rumah warga terdampak. Air menggenangi permukiman di sejumlah kecamatan, menyebabkan warga harus menyesuaikan aktivitas mereka. Aktivitas harian dibatasi, sementara perabot dan barang berharga diamankan agar tidak menjadi korban berikutnya dari air yang terus bertahan.

Siklus Banjir Lima Tahunan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara menjelaskan bahwa banjir ini bukan sekadar persoalan hujan lokal atau kondisi wilayah semata. Peristiwa ini merupakan bagian dari siklus banjir lima tahunan yang datang seperti gelombang besar, dipicu oleh limpahan air dari daerah hulu sungai.

Air kiriman tersebut mengalir dari sejumlah sungai besar di wilayah sekitar, seperti Sungai Tabalong, Sungai Balangan, dan Sungai Negara. Ketika ketiganya “datang bersamaan”, wilayah Hulu Sungai Utara menjadi muara terakhir yang harus menampung seluruh limpahan air tersebut.

BPBD HSU mencatat bahwa banjir besar dengan intensitas serupa telah muncul secara berkala, mulai awal 2010, awal 2015, tahun 2020, hingga kembali hadir di penghujung 2025 dan berlanjut ke awal 2026. Kondisi ini semakin berat karena Desember merupakan puncak musim hujan. Meski curah hujan pada Januari diperkirakan



Gambar 19 Grafik Jumlah Kejadian Banjir Berdasarkan Tahun. Sumber: DIBI BNPB

berada pada kategori normal, muka air sungai yang sudah terlanjur tinggi membuat hujan lanjutan tetap berpotensi menambah volume air dan memperpanjang genangan.

Warga Bersiap, Pemerintah Bertindak, Semua Bergerak.

Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bergerak cepat agar air segera surut dan dapat situasi dapat terkendali. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah normalisasi sungai di sejumlah titik rawan banjir.

Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Noor, bersama Wakil Bupati Suriani, menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang segera melakukan pengeringan sungai dengan prioritas utama di wilayah Bangkau, yang dinilai paling mendesak untuk ditangani. Langkah ini dibahas dalam rapat terbatas percepatan penanganan dampak banjir yang digelar pada Senin, 5 Januari 2026, di Rumah Jabatan Bupati HSS.

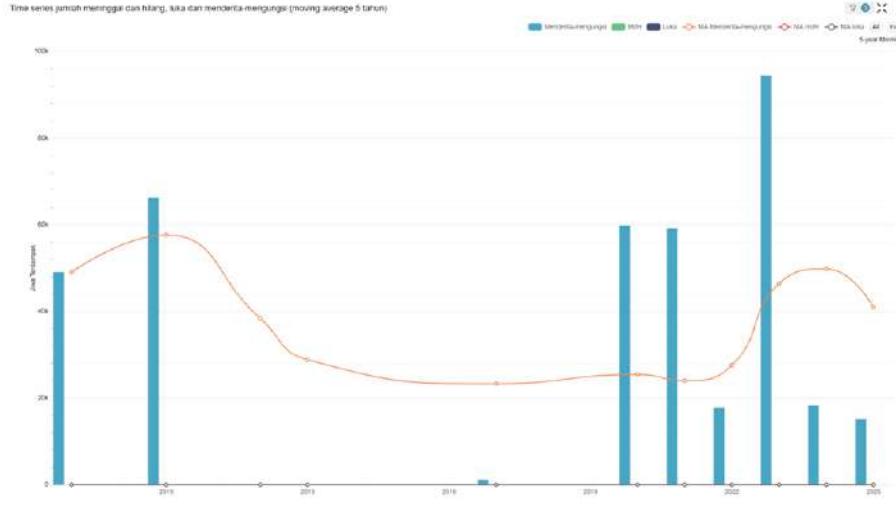
Rapat tersebut melibatkan Sekretaris Daerah Muhammad Noor, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten HSS Kusairi, para kepala perangkat daerah terkait, serta camat dari wilayah terdampak. Dalam pembahasan itu, pemerintah daerah juga menetapkan bahwa setelah Bangkau, penanganan akan dilanjutkan ke wilayah Kalumpang dan Wawaran Angkinang, dengan total panjang sungai yang akan dinormalisasi mencapai sekitar 30 kilometer.

Bukan Soal Air Semata, Namun Pangan Juga.

Selain mengurusi sungai, pemerintah daerah juga berupaya meringankan beban warga yang terdampak. Melalui Dinas Sosial, disiapkan 1.500 paket sembako berisi kebutuhan pokok sehari-hari, mulai dari bahan pangan hingga kebutuhan dapur, agar roda kehidupan warga tetap bisa berputar meski dalam keterbatasan.

Bantuan lain juga mengalir dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram per kepala keluarga selama empat bulan melalui program cadangan pangan Dinas Pertanian. Bagi warga yang rumahnya masih terus dikepung genangan, pemerintah daerah menyiapkan bantuan dana untuk pembelian papan atau balok titian, sehingga akses ke rumah tetap terjaga meski air belum sepenuhnya surut.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten HSS juga merencanakan program peninggian tiang rumah panggung, khususnya bagi warga di wilayah Kalumpang. Upaya ini diharapkan menjadi langkah adaptasi agar rumah-rumah warga lebih aman saat air kembali naik. Seluruh rangkaian bantuan dan penanganan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan harapan tidak hanya menjadi solusi sesaat, tetapi juga bekal menghadapi banjir yang kerap datang berulang.



Gambar 20 Grafik Korban Terdampak, Mengungsi, Meninggal, dan Hilang. Sumber: DIBI BNPB

BANJIR KABUPATEN BANJAR, PROV. KALIMANTAN SELATAN

Penghujung tahun 2025, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sering diguyur hujan sejak pertengahan Desember. Curah hujan tinggi terjadi secara intensif beberapa hari sebelum 15 Desember, sehingga air sungai meluap dan merendam permukiman warga terutama di wilayah hilir. Hujan lebat ini juga tercatat menjadi bagian dari rangkaian kejadian hujan ekstrem yang melanda beberapa wilayah Indonesia pada Desember 2025. BPBD Kabupaten Banjar mencatat dampak signifikan akibat banjir ini adalah 113.735 orang terdampak, 4.083 orang mengungsi, dan mengakibatkan 9.966 unit rumah terendam.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar berdampak luas dan meluas hampir ke seluruh wilayah administratif. Berdasarkan pendataan Pusdalops BNPB, terdapat 14 kecamatan dengan 152 desa yang terdampak langsung oleh kejadian banjir tersebut. Wilayah dengan dampak paling luas berada di Kecamatan Sungai Tabuk, yang mencatat jumlah desa terdampak terbanyak, yakni 21 desa. Kondisi ini menunjukkan tingginya kerentanan wilayah yang berada di sepanjang aliran sungai dan daerah dataran rendah. Selain Sungai Tabuk, dampak signifikan juga dirasakan di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Martapura Timur, masing-masing dengan 20 desa terdampak. Sementara itu, Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Astambul turut mengalami dampak cukup besar dengan jumlah desa terdampak lebih dari 15 desa per kecamatan.

Sebaran wilayah terdampak mencakup kawasan perkotaan, perdesaan, hingga daerah bantaran sungai, yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, kerusakan permukiman, dan berdampak pada infrastruktur serta layanan dasar. Kondisi ini menegaskan bahwa kejadian banjir di Kabupaten Banjar bukan bersifat lokal, melainkan bencana berskala wilayah yang memerlukan penanganan terpadu lintas sektor.

Pendataan wilayah terdampak ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam penetapan status tanggap darurat, penyaluran bantuan, serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memprediksi bahwa wilayah Kalimantan Selatan memasuki fase puncak musim hujan, yang ditandai dengan meningkatnya intensitas dan durasi hujan. Kondisi ini menyebabkan akumulasi curah hujan harian dan mingguan yang melebihi kapasitas normal Daerah Aliran Sungai (DAS).

Curah hujan yang tinggi tersebut berdampak langsung pada kenaikan muka air Sungai Martapura beserta anak-anak sungainya, hingga akhirnya meluap dan menggenangi permukiman warga di wilayah dataran rendah serta bantaran sungai. Luapan air terjadi karena volume air yang masuk jauh lebih besar dibandingkan kemampuan sungai untuk mengalirkan air ke hilir.

Pada sisi lain, sistem drainase dan kawasan bantaran sungai tidak mampu menampung limpasan air hujan dalam jumlah besar, sehingga air dengan cepat meluap ke jalan, lahan pertanian, dan kawasan permukiman. Kondisi topografi wilayah yang relatif datar turut memperlambat surutnya genangan. Meskipun sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) telah mencatat dan memantau kenaikan tinggi muka air sungai, curah hujan yang terus



Gambar 21 Petugas mengevakuasi lansia yang terjebak banjir di Desa Dala Pagar Iilit, Martapura Timur. Sumber: DPKP BANJAR

berlangsung membuat upaya mitigasi menjadi terbatas. Intensitas hujan yang tinggi dalam waktu lama menyebabkan banjir tetap terjadi dan meluas ke beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar.

Tabel 4 Daerah Terdampak Banjir di Kabupaten Banjar (15 Desember 2025)

Kecamatan	Desa/Kelurahan
Kertak Hanyar	Simpang Empat, Kertak Hanyar II, Sungai Lakum, Pasar Kamis, Belayung Baru, Manarap Baru, Benua Anyar, Mandarsari (Kel), Manarap (Kel), Kertak Hanyar I (Kel)
Sungai Tabuk	Sungai Lulut, Sungai Tandipah, Lok Baintan Bakung, Sungai Baintan, Gudang Hirang, Sungai Pinang Lama, Pembantanan, Pemakuan, Sungai Tabuk Kota, Sungai Tabuk Keramat, Lok Buntar, Gudang Tengah, Pen-jambuan, Keliling Benteng Ilir, Sungai Pinang Baru, Paku Alam, Lok Baintan
Martapura	Bincau, Bincau Muara, Tunggul Irang, Tunggul Irang Ulu, Tunggul Irang Ilir, Tungkaran, Sungai Sipai, Labuan Tabu, Jawa Laut, Tanjung Rema, Tambak Baru Ilir, Keraton, Murung Keraton, Pasayangan (Kel), Pasayangan Barat, Tambak Baru, Tambak Baru Ulu, Jawa (Kel), Murung Kenanga, Tanjung Re-
Karang Intan	Awang Bangkal Barat, Awang Bangkal Timur, Jingah Habang Ulu, Karang Intan, Kiram, Mali-Mali, Mandiangan Barat, Mandiangan Timur, Mandikapau Barat, Mandikapau Timur, Pandak Daun, Pasar Lima, Penyambaran, Sungai
Astambul	Pingaran Ulu, Danau Salak, Jati, Kelampaian Tengah, Kelampaian Ulu, Munggu Raya, Pingaran Ilir, Pasar Jati, Astambul Seberang, Sungai Alat, Lok Gabang, Tambak Danau, Kelampaian Ilir, Astambul Kota, Pematang Hambawang, Sungai Tuan Ilir
Simpang Empat	Sungai Tabuk, Lok Cantung, Lawiran, Sungai Langsat, Tanah Intan, Sungai Raya
Pengaron	Pengaron, Lumpangi, Benteng, Lobang Baru, Lok Tunggal, Ati'im, Mangkauk
Sungai Pinang	(data desa tidak tercantum)
Aranio	Tambela
Mataraman	Baru, Tanah Abang, Bawahan Pasar, Mangkalawat, Simpang Tiga, Mata-raman, Bawahan Selan, Pematang Danau, Surian
Martapura Barat	Teluk Selong Ulu, Antasan Sutun, Keliling Benteng Tengah, Keliling Benteng Ulu, Penggalaman, Sungai Batang, Sungai Batang Ilir, Sungai Rangas, Sungai Rangas Hambuku, Sungai Rangas Tengah, Sungai Rangas Ulu, Tangkas, Teluk Selong
Martapura Timur	Pekauman, Pekauman Ulu, Pekauman Dalam, Mekar, Melayu, Melayu Ilir, Melayu Tengah, Akar Bagantung, Keramat, Keramat Baru, Akar Baru, Dalam Pagar, Dalam Pagar Ulu, Sungai Kitano, Pematang Baru, Antasan Senor, Antasan Senor Ilir, Tambak Anyar, Tambak Anyar Ilir, Tambak Anyar Ulu Sungai Lurus
Sambung Makmur	Alalak Padang, Benua Anyar, Simpang Lima, Makmur Karya, Karya Makmur, Sindang Jaya, Garis Hanyar, Keramat Mina, Surian Hanyar, Cintapuri, Sum-ber Sari

Dengan demikian, banjir ini merupakan kombinasi antara faktor meteorologis (cuaca ekstrem sesuai prediksi BMKG) dan keterbatasan daya tampung sungai serta sistem drainase, yang secara bersama-sama memicu terjadinya bencana banjir di Kabupaten Banjar.

Sampai akhir Desember 2025, Kabupaten Banjar juga kembali diterpa banjir yang dampaknya cukup masif sehingga ditetapkan status tanggap darurat banjir oleh Bupati Banjar pada 30 Desember 2025.



Gambar 22 Infografis Banjir Kabupaten Banjar 31 Desember 2025. Sumber: Pusdalops BPBD Kab. Banjar

Berdasarkan prediksi dan peringatan dini BMKG, wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Banjar, masih berada dalam periode musim hujan hingga awal tahun 2026. Pada periode tersebut, BMKG memprakirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih dapat terjadi, baik secara merata maupun bersifat lokal, terutama pada sore hingga malam hari.

Kondisi ini menimbulkan ancaman banjir susulan, khususnya di wilayah yang sebelumnya telah terdampak banjir. Tanah yang sudah jenuh air dan kondisi sungai yang belum sepenuhnya kembali normal menyebabkan wilayah rawan banjir menjadi lebih sensitif terhadap hujan lanjutan, meskipun hujan tidak berlangsung dalam durasi yang sangat panjang.

Selain banjir, BMKG juga mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang dan kilat/petir, yang dapat memicu:

1. Kenaikan kembali tinggi muka air sungai secara cepat;
2. Genangan di kawasan permukiman dan jalan;
3. Gangguan aktivitas masyarakat dan distribusi logistik;
4. Risiko longsor di wilayah dengan kontur tanah miring atau tebing sungai.

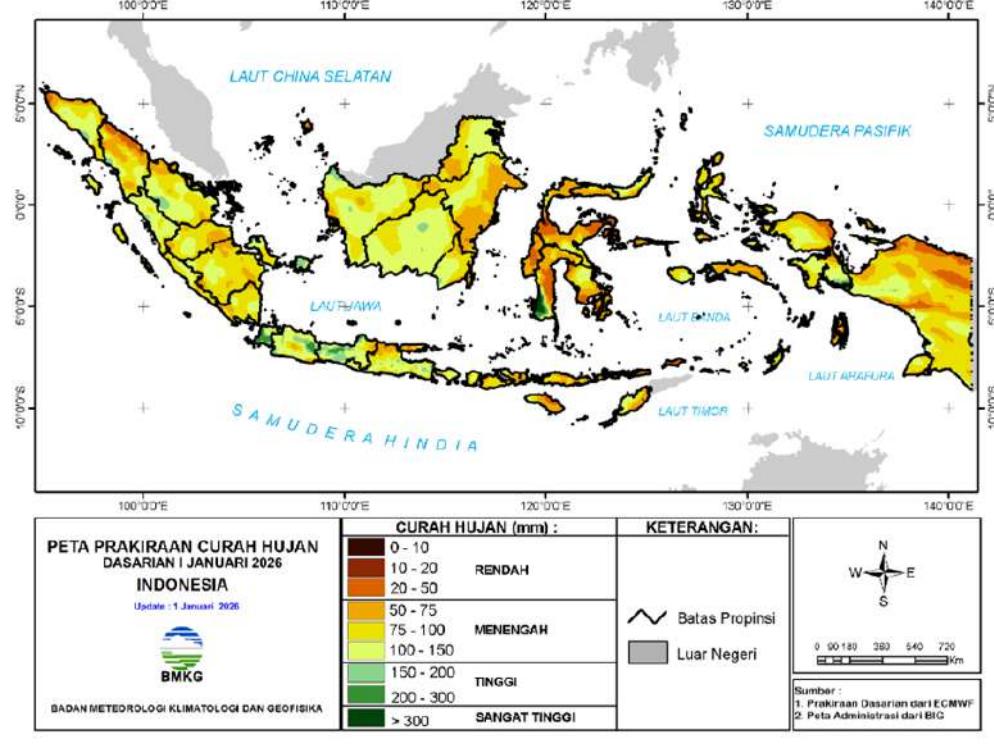
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1. Memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG secara berkala melalui kanal resmi, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi;

2. Waspada terhadap kenaikan air sungai, khususnya bagi warga yang tinggal di bantaran sungai dan daerah rendah;
3. Menyiapkan langkah evakuasi mandiri, termasuk mengenali jalur evakuasi dan lokasi aman terdekat jika banjir kembali terjadi;
4. Mengamankan barang-barang penting, seperti dokumen kependudukan, peralatan elektronik, dan logistik dasar, ke tempat yang lebih tinggi;
5. Menghindari aktivitas di sekitar sungai saat hujan lebat dan tidak memaksakan diri melintasi genangan atau arus air yang deras;
6. Mengikuti arahan pemerintah daerah, BPBD, dan aparat setempat, terutama jika terdapat imbauan siaga atau evakuasi.

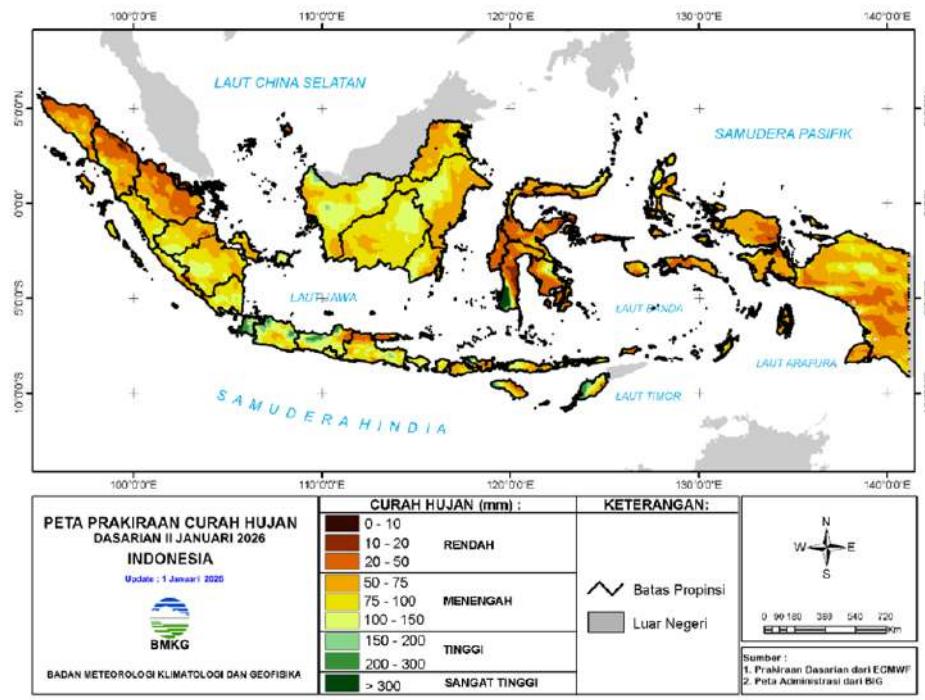
POTENSI BENCANA BULAN JANUARI 2026

Secara klimatologis, bulan Januari dikenal sebagai periode dengan kecenderungan curah hujan tinggi dan sering kali menjadi puncak musim hujan di Indonesia, sehingga pada akhir Desember BMKG telah merilis prakiraan curah hujan sebagai dasar kewaspadaan untuk Januari 2026. Berdasarkan prakiraan curah hujan BMKG untuk Januari 2026, kondisi hujan di Indonesia selama Dasarian I hingga III secara umum didominasi oleh kategori menengah (50–150 mm per dasarian) dengan persentase berturut-turut sekitar 86,07%, 78,90%, dan 78,68%, yang mencakup hampir seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Bali–Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.



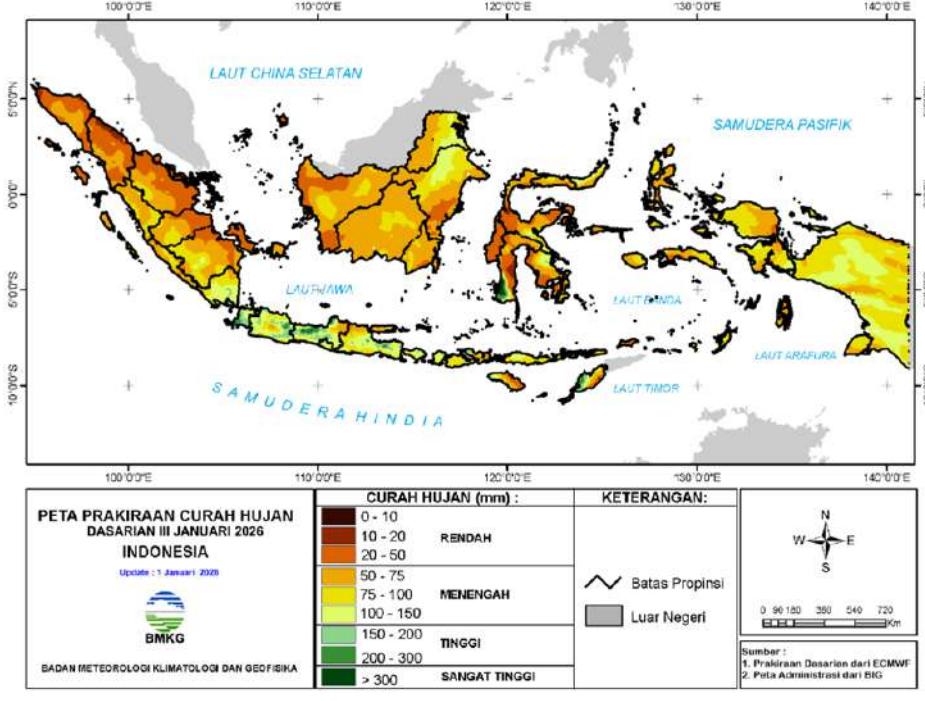
Gambar 23 Peta Prakiraan Curah Hujan Dasarian I Januari 2026 di Indonesia.

Sumber: BMKG

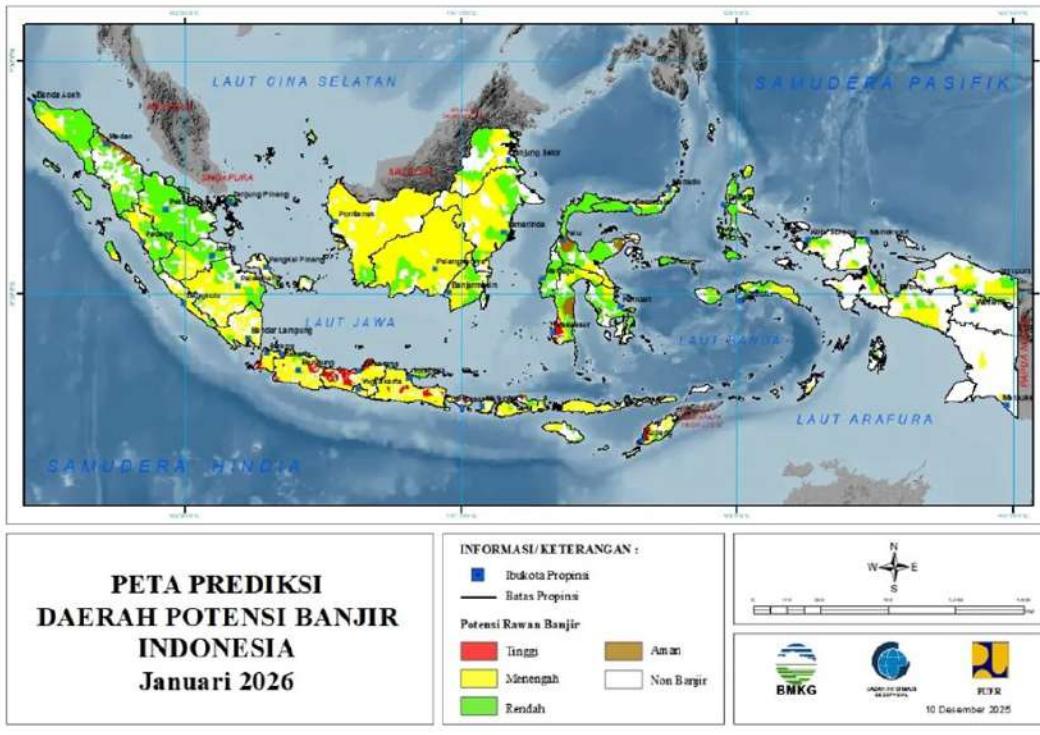


Gambar 24 Peta Prakiraan Curah Hujan Dasarian II Januari 2026 di Indonesia. Sumber: BMKG

Sementara wilayah dengan hujan kategori rendah (0–50 mm per dasarian) berkisar antara 11–19% dan cenderung terjadi di sebagian Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi pesisir, Kepulauan Riau, Sulawesi bagian tertentu, Maluku, dan Papua Barat; hujan kategori tinggi (150–300 mm per dasarian) diprakirakan relatif terbatas (sekitar 1–3%) namun konsisten muncul di wilayah rawan seperti Banten selatan, DKI Jakarta (khususnya Jakarta Utara dan sekitarnya), sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur tertentu, Sulawesi Selatan, serta Kepulauan Sangihe, sedangkan hujan kategori sangat tinggi (>300 mm per dasarian) yang sangat terbatas (<1%) berulang kali diprakirakan terkonsentrasi di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar dan wilayah sekitarnya, sehingga secara keseluruhan Januari 2026 menunjukkan pola puncak musim hujan dengan intensitas dominan menengah namun disertai potensi hujan lebat hingga sangat lebat secara lokal yang perlu diwaspadai.



Gambar 25 Peta Prakiraan Curah Hujan Dasarian II Januari 2026 di Indonesia. Sumber: BMKG



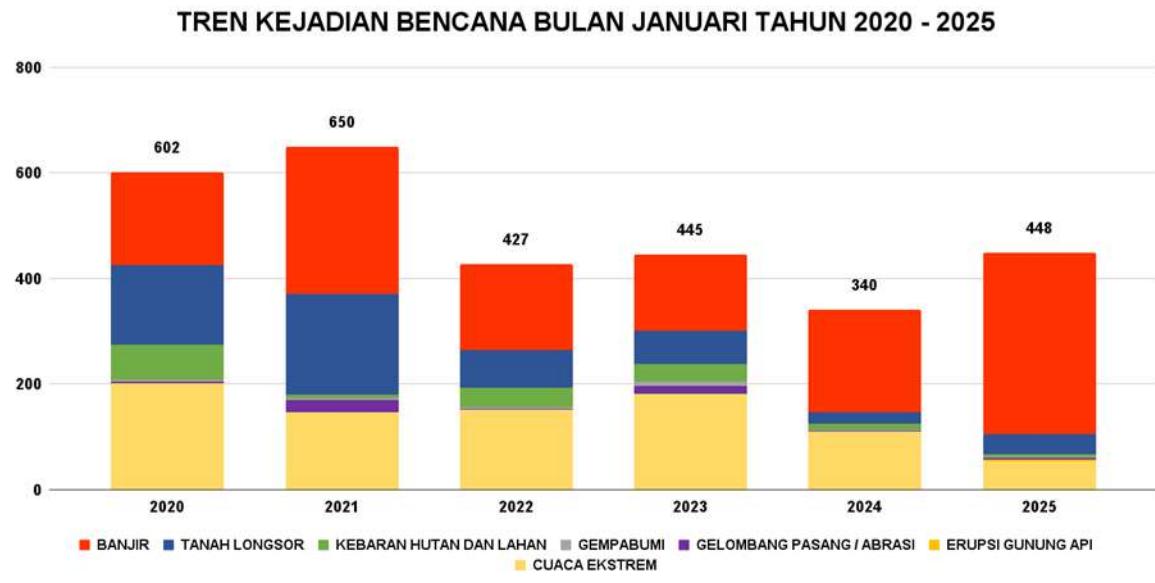
Gambar 26 Peta Prediksi Daerah Potensi Banjir di Indonesia Januari 2026. Sumber: BMKG

Selain Peta curah hujan, BMKG bekerja sama dengan DitJen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) memprediksi daerah yang berpotensi banjir seperti yang ditunjukkan pada Gambar x. Pada peta prakiraan daerah potensi banjir tersebut, potensi banjir pada bulan Januari 2026 diperkirakan meningkat di wilayah-wilayah yang secara klimatologis rawan genangan dan dialiri sungai besar, terutama di sebagian pesisir timur Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, kemudian di Pulau Jawa meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan; selain itu, wilayah Sulawesi Selatan—khususnya kawasan perkotaan dan dataran rendah—serta beberapa wilayah Maluku dan Papua juga berpotensi terdampak seiring dominannya curah hujan menengah hingga tinggi pada periode tersebut, sehingga BMKG mengimbau peningkatan kewaspadaan terhadap risiko banjir dan banjir bandang, terutama di daerah dengan sistem drainase terbatas, daerah aliran sungai (DAS) besar, dan wilayah dataran rendah selama puncak musim hujan Januari 2026.

Mengacu pada Grafik Tren Kejadian Bencana di Indonesia bulan Januari tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor mendominasi 92% dari total jumlah kejadian bencana selama bulan Januari selama lima tahun terakhir. Berdasarkan Grafik tersebut, ditambah prakiraan curah hujan dan potensi daerah banjir dari BMKG, dapat disimpulkan bahwa bulan Januari 2026 memiliki potensi bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, cuaca ekstrim, serta tanah longsor yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia.

Seiring prediksi BMKG yang menunjukkan Januari 2026 sebagai periode dengan dominasi curah hujan menengah hingga tinggi dan berpotensi menjadi puncak musim hujan di berbagai wilayah Indonesia, masyarakat dan pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan pohon tumbang; langkah antisipatif yang perlu diperkuat meliputi pengecekan dan pembersihan sistem drainase serta sungai, peningkatan kewaspadaan di daerah aliran sungai, lereng rawan longsor, dan kawasan dataran rendah, penyiapatan jalur serta tempat evakuasi beserta logistik darurat, penguatan koordinasi antar instansi, dan pemantauan intensif terhadap informasi prakiraan serta peringatan dini

cuaca dari BMKG, sehingga upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan secara lebih efektif, terencana, dan responsif sepanjang Januari 2026.



Gambar 27 Grafik Trend Kejadian Bencana di Indonesia pada Bulan Januari Tahun 2020-2025. Sumber: BNPB

